

# OPTIMALISASI LAYANAN PUBLIK DI SMART CITY DKI JAKARTA MELALUI INTEGRASI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENGELOLAAN DINAMIKA KEPENDUDUKAN

Alfieny Putri Heriyanto<sup>1\*</sup>, Apriade Voutama<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Singaperbangsa Karawang; Jalan H.S. Ronggowaluyo Teluk Jambe 41361 Karawang; 0812-1866-9229

Received: 2 Maret 2025  
Accepted: 27 Maret 2025  
Published: 14 April 2025

## Keywords:

Digitalization, Population Dynamics, Jakarta Smart City, Digital Divide, Economic Growth

## Correspondent Email:

alfienyputrih@gmail.com

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji dinamika kependudukan dan perkembangan teknologi digitalisasi di DKI Jakarta serta implikasinya terhadap berbagai aspek sosial dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta data sekunder dari lembaga resmi. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi melalui program Jakarta Smart City dan layanan publik berbasis teknologi, seperti aplikasi Jakarta Kini (JAKI), telah meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Namun, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan digital yang menghambat pemerataan akses dan pemanfaatan teknologi di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Dengan regulasi yang adaptif dan evaluasi kebijakan yang berkelanjutan, Jakarta berpotensi menjadi model kota digital yang inovatif di Indonesia.

**Abstract.** *This study examines the dynamics of population and digitalization development in DKI Jakarta and its implications for various social and economic aspects. The research method employed is a literature review, analyzing scientific journals, research reports, and secondary data from official institutions. The findings indicate that digitalization, through the Jakarta Smart City program and technology-based public services such as the Jakarta Kini (JAKI) application, has improved government efficiency and the quality of life for residents. Furthermore, technological advancements have contributed to poverty reduction and supported economic growth in Jakarta. However, challenges remain, particularly the digital divide, which hampers equitable access to and utilization of technology across all social strata. Therefore, a collaborative strategy involving the government, private sector, and society is essential to ensure an inclusive and sustainable digital transformation. With adaptive regulations and continuous policy evaluations, Jakarta has the potential to become an innovative digital city model in Indonesia.*

## 1. PENDAHULUAN

Dinamika demografis wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital yang pesat. Revolusi digital ini berdampak pada tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik serta cara masyarakat berinteraksi. Tulisan ini bertujuan mengeksplorasi hubungan antara dinamika kependudukan dan perkembangan teknologi digitalisasi di DKI Jakarta serta implikasinya bagi kebijakan kependudukan.

DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dan urbanisasi yang intens. Banyak masalah yang ditimbulkan oleh populasi yang padat, termasuk polusi udara, kemacetan lalu lintas, dan kebutuhan akan layanan publik yang efektif. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengadopsi ide *Smart City*, yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup penduduknya dengan memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diharapkan dapat membantu memecahkan masalah perkotaan dan meningkatkan efektivitas layanan publik [1].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan teknologi digital mempengaruhi dinamika kependudukan di DKI Jakarta. Secara spesifik, penelitian ini akan mengeksplorasi dampak implementasi teknologi digital terhadap pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk, peran teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi generasi milenial dan Gen Z dalam kebijakan kependudukan, serta tahapan

perkembangan DKI Jakarta menuju *Smart City* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Topik-topik terkait telah dibahas dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Pendekatan pemerintah DKI Jakarta dalam menciptakan ide Kota Cerdas untuk mengatasi masalah perkotaan termasuk kemacetan lalu lintas dan kepadatan penduduk diteliti oleh Farendy dan Akbar (2024) [2]. Gemawaty (2024) meneliti peran TIK dalam pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta, menunjukkan bahwa inovasi teknologi membuka peluang baru dalam sektor bisnis dan meningkatkan efisiensi layanan publik [3]. Lebih lanjut, Alfarizi (2023) melihat seberapa baik kebijakan kependudukan menerima transisi digital, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi kartu identitas dan keterlibatan milenial dan Gen Z [1].

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa konsep teoritis utama yang menjadi dasar analisis. Salah satu konsep utama adalah *Smart City*, yang merujuk pada pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, kualitas hidup warga, serta keberlanjutan lingkungan. Konsep ini telah diterapkan di berbagai kota besar di dunia, termasuk DKI Jakarta, yang tengah berupaya mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan perkotaan. Implementasi *Smart City* tidak hanya melibatkan penyediaan infrastruktur teknologi, tetapi juga transformasi budaya kerja pemerintahan dan pola interaksi masyarakat dengan layanan publik [4].

Selain itu, konsep *E-Government* juga menjadi bagian integral dari penelitian ini. *E-Government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk

menyediakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Implementasi e-government di Jakarta menjadi langkah awal dalam transformasi menuju Smart City, dengan berbagai layanan digital yang sudah diterapkan, seperti aplikasi layanan kependudukan, pajak online, dan sistem pengaduan berbasis digital. Namun, isu-isu seperti infrastruktur teknologi yang tidak merata dan rendahnya literasi digital masyarakat terus menghambat efektivitas e-government [5].

Selain itu, aspek *Digital Divide* atau kesenjangan digital juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Digital divide mengacu pada perbedaan akses dan pemanfaatan teknologi digital di antara berbagai kelompok masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, pendidikan, atau geografis. Di Jakarta, meskipun akses terhadap internet dan perangkat digital semakin luas, masih terdapat kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses atau memanfaatkan teknologi secara optimal. Pemahaman terhadap digital divide sangat penting agar transformasi digital yang terjadi di Jakarta tidak memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwarga kota.

Dengan memahami dinamika kependudukan dan perkembangan teknologi digitalisasi di DKI Jakarta, Melalui penggunaan teknologi digital, penelitian ini diyakini dapat membantu para pembuat kebijakan untuk mengembangkan rencana yang secara efektif akan mengatur perluasan kota dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akademik terkait transformasi

digital dan kebijakan kependudukan di kota-kota besar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Smart City

Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan efisiensi layanan publik dikenal sebagai konsep “kota pintar”. Menggunakan teknologi digital untuk mengelola aset kota, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, dan layanan publik, dikenal sebagai “implementasi kota pintar.” DKI Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, telah mengadopsi konsep ini untuk mengatasi berbagai tantangan perkotaan, seperti kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas [4].

### Smart Governance

Penggunaan kebijakan berbasis TIK yang mengintegrasikan masyarakat, bisnis, dan kerja sama pemerintah dalam pengambilan keputusan dan penyediaan layanan publik dikenal sebagai “smart governance.” Platform Jakarta Open Data, yang menawarkan data terbuka untuk mendorong keterbukaan dan keterlibatan masyarakat, adalah contoh bagaimana ide ini dipraktikkan di Jakarta. Selain itu, pemantauan kondisi kota secara real-time dimungkinkan oleh integrasi Internet of Things (IoT), termasuk sensor untuk manajemen banjir, yang memungkinkan reaksi darurat yang cepat [6].

## Digital Divide

Kesenjangan dalam cara berbagai kelompok sosial menggunakan dan memiliki akses ke teknologi digital dikenal sebagai “Digital Divide”. Untuk memastikan bahwa kesenjangan sosial tidak diperburuk oleh revolusi digital, sangat penting untuk memahami kesenjangan ini. Pembangunan infrastruktur digital dan peningkatan literasi teknis masyarakat adalah dua cara yang dilakukan DKI Jakarta untuk menutup kesenjangan digital [7].

## SDLC (System Development Life Cycle)

Metode Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan pendekatan dalam perancangan sistem yang digunakan untuk mengilustrasikan langkah-langkah serta tahapan utama yang terlibat dalam setiap proses pengembangan perangkat lunak [8]. Tahapan utama SDLC meliputi perencanaan, analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, jadwal, dan sumber daya. Analisis berfokus pada kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem. Desain mencakup arsitektur, antarmuka, dan database. Implementasi melibatkan pengembangan kode, sementara pengujian memastikan fungsionalitas dan mengidentifikasi bug. Pemeliharaan dilakukan melalui pembaruan dan perbaikan sesuai kebutuhan. [9]

## Metode Waterfall

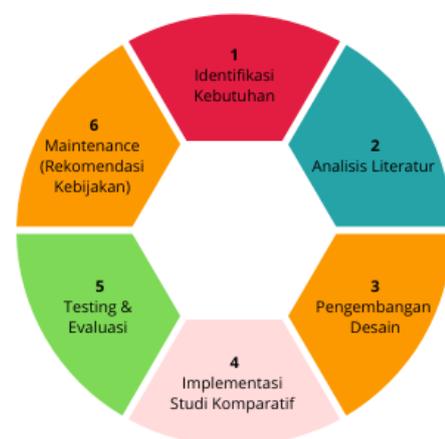
Metode Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang menerapkan proses berurutan dan

terstruktur, dimulai dari tahap analisis kebutuhan, kemudian berlanjut ke perancangan sistem, implementasi, hingga tahap pengujian sebagai langkah akhir [10]. Metode ini disebut Waterfall karena proses pengembangan perangkat lunak dilakukan secara bertahap, di mana setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya hingga mencapai tahap akhir [11].

## 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kajian pustaka dengan pendekatan rekayasa sistem, di mana proses analisis dilakukan menggunakan kerangka SDLC (System Development Life Cycle) dengan metode waterfall. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pendekatan sistematis dalam mengkaji dinamika kependudukan serta perkembangan teknologi digitalisasi di DKI Jakarta, sekaligus mengidentifikasi implikasinya terhadap kebijakan publik.

Studi ini terdiri dari beberapa tahap utama dalam SDLC, yaitu:



Gambar 1 Metode Waterfall

1. Planning – Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dengan merumuskan permasalahan utama terkait digitalisasi dan kependudukan di DKI Jakarta.
2. Analysis – Laporan penelitian, buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi dari lembaga terkait hanyalah beberapa contoh dari beragam sumber literatur yang harus kumpulan dan periksa.
3. Design – Menyusun kerangka konseptual berbasis literatur yang mencakup tema utama seperti smart city, smart governance, dan digital divide.
4. Implementation – Melakukan studi komparatif terhadap berbagai penelitian sebelumnya untuk memahami pola perkembangan digitalisasi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di DKI Jakarta.
5. Testing & Evaluation – Mensintesis temuan dari berbagai literatur guna mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta mengevaluasi efektivitas kebijakan digital yang telah diterapkan.
6. Maintenance – Menghasilkan rekomendasi berbasis kajian pustaka untuk perbaikan kebijakan digitalisasi di DKI Jakarta ke depan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang lebih struktural dan sistematis dalam memahami dampak teknologi digital terhadap perubahan sosial dan kebijakan di DKI Jakarta, serta menyajikan landasan konseptual yang kuat untuk mendukung

pengembangan strategi digitalisasi yang lebih efektif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika populasi dan pertumbuhan ekonomi hanyalah dua dari sekian banyak aspek kehidupan masyarakat yang terkena dampak signifikan dari perkembangan teknologi digital di DKI Jakarta. Penerapan e-Government oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) merupakan salah satu indikator utama. Penelitian menunjukkan bahwa JAKI berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menyediakan akses informasi yang lebih mudah dan transparan bagi warga Jakarta. Aplikasi ini mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pelaporan masalah kota, informasi lalu lintas, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik [12].

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta [13]. Jumlah penduduk dan perkembangan teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, terutama dalam situasi krisis yang membatasi interaksi fisik.

Namun, di sisi lain, pandemi COVID-19 juga menyoroti adanya kesenjangan digital di masyarakat [14]. Percepatan perkembangan teknologi digital selama pandemi membawa banyak peluang, tetapi juga menyoroti ketimpangan dalam akses

dan pemanfaatannya. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil, sehingga mereka kesulitan mengikuti perubahan yang terjadi. Selain itu, rendahnya literasi digital di beberapa kalangan menyebabkan keterbatasan dalam mengakses layanan daring, baik untuk pendidikan, ekonomi, maupun administrasi publik.

Masyarakat, sektor korporat, dan pemerintah harus bekerja sama untuk menyediakan akses yang lebih adil untuk menjamin transformasi digital yang inklusif. Perluasan program pelatihan literasi digital diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami kelebihan dan kekurangannya. Dengan pendekatan yang holistik, digitalisasi dapat menjadi alat pemberdayaan yang benar-benar memberikan dampak positif bagi semua lapisan masyarakat.

Penerapan konsep Jakarta Smart City menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah sedang berupaya meningkatkan standar hidup masyarakat dan meningkatkan efektivitas layanan publik dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sejumlah industri. Namun demikian, ada sejumlah kendala yang harus diatasi untuk mewujudkan ide ini, seperti infrastruktur teknologi yang tidak merata dan keengganan beberapa individu untuk mengadopsi teknologi baru.

Metrik penting lainnya untuk menilai dampak teknologi digital adalah pergeseran dalam kebiasaan konsumsi media masyarakat. Pola konsumsi media tradisional telah bergeser ke pola konsumsi

digital sebagai akibat dari meluasnya adopsi teknologi digital. Selain menciptakan peluang baru di bidang ekonomi kreatif, pergeseran ini juga berdampak pada hubungan sosial dan budaya masyarakat.

Selain itu, ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan terus berkembang hingga tahun 2030 [15]. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan penggunaan internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar di era ekonomi digital. Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta diperkirakan akan menjadi mesin utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

Namun, kerja sama antara sektor publik, komersial, dan komunitas diperlukan untuk mewujudkan potensi ini. Sementara sektor swasta dapat berkontribusi pada inovasi dan kemajuan teknis, pemerintah juga harus menyediakan infrastruktur dan hukum yang sesuai. Untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, masyarakat umum juga harus meningkatkan tingkat literasi digital mereka [16].

Selain itu, penting untuk mengatasi kesenjangan digital yang masih ada. Program-program pelatihan dan edukasi teknologi perlu ditingkatkan, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan tertinggal dalam adopsi teknologi. Dengan demikian, transformasi digital dapat berjalan inklusif dan berkeadilan [17].

Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah perlu merumuskan strategi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kebijakan yang fleksibel dan responsif akan memungkinkan pemerintah untuk mengakomodasi perubahan yang cepat dalam teknologi dan kebutuhan masyarakat [18].

Selain itu, elemen penting dalam menjamin keberhasilan kebijakan digital adalah kerja sama antara sektor publik dan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil. Sementara sektor swasta dapat mendukung pengembangan infrastruktur dan inovasi teknologi, pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga akademis dan pusat penelitian untuk menciptakan kebijakan berbasis data. Di sisi lain, masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan melalui forum diskusi atau survei publik agar kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga [4]. Dengan menerapkan kebijakan digital yang adaptif, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat proses birokrasi. Dengan menerapkan digitalisasi administrasi, masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah dan transparan, sehingga mengurangi hambatan yang sering muncul dalam sistem konvensional. Selain itu, implementasi sistem transportasi cerdas dapat membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi mobilitas perkotaan.

Selain aspek efisiensi, penguatan keamanan siber juga menjadi prioritas dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem yang diterapkan mampu melindungi data pribadi warga serta mengantisipasi potensi ancaman siber. Dengan mengambil langkah-langkah yang telah diperhitungkan ini, Jakarta dapat berkembang menjadi kota

pintar yang lebih berkelanjutan, efisien, dan inklusif, yang menawarkan manfaat nyata bagi semua penduduknya.

Evaluasi berkala terhadap implementasi teknologi digital harus mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas layanan, tingkat adopsi oleh masyarakat, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Pemerintah perlu melakukan survei kepuasan pengguna, mengukur peningkatan efisiensi layanan publik, serta mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi dalam pemanfaatan teknologi [5]. Selain itu, evaluasi juga harus mempertimbangkan aspek inklusivitas, memastikan bahwa kelompok rentan, seperti masyarakat berpenghasilan rendah dan lansia, tidak tertinggal dalam proses transformasi digital. Dengan data yang diperoleh dari evaluasi ini, kebijakan dan program teknologi digital dapat terus disesuaikan agar semakin relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain aspek teknis dan sosial, evaluasi implementasi teknologi digital juga harus memperhatikan faktor keamanan dan etika. Perlindungan data pribadi menjadi prioritas utama agar masyarakat merasa aman dalam berinteraksi di ruang digital. Selain itu, transparansi algoritma perlu dijaga untuk memastikan bahwa sistem digital yang digunakan tidak menimbulkan bias atau diskriminasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi serta menegakkan regulasi guna mencegah potensi penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.

Pendekatan evaluatif yang menyeluruh juga harus mencakup mitigasi terhadap risiko-risiko yang muncul dari digitalisasi,

termasuk ancaman siber dan penyalahgunaan informasi. Selain itu, kebijakan digital yang diterapkan harus tetap menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam ruang digital, seperti kebebasan berekspresi dan akses yang setara terhadap teknologi. Dengan komitmen terhadap keamanan dan etika, perkembangan teknologi digital di Jakarta dapat berjalan secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, sekaligus melindungi kepentingan publik secara lebih luas.

## 5. KESIMPULAN

Berbagai aspek kehidupan, seperti dinamika populasi dan pertumbuhan ekonomi, telah dipengaruhi secara signifikan oleh perkembangan teknologi digital di DKI Jakarta. Digitalisasi layanan publik melalui platform seperti Jakarta Kini (JAKI) telah meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pemerintah, membantu masyarakat mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah. Selain itu, penerapan konsep Jakarta Smart City berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital yang belum merata. Penurunan angka kemiskinan di Jakarta menunjukkan bahwa digitalisasi juga berkontribusi dalam mendukung kebijakan sosial dan ekonomi daerah.

Namun, kesenjangan digital masih menjadi tantangan utama dalam proses transformasi ini. Tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal karena keterbatasan akses dan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan

upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi hambatan tersebut. Dengan strategi kebijakan yang adaptif dan evaluasi yang berkelanjutan, transformasi digital di Jakarta dapat berlangsung secara inklusif, berkeadilan, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Institusi akademik, dosen pembimbing, dan rekan-rekan yang telah memberikan kontribusi yang signifikan selama proses penelitian ini layak mendapatkan penghargaan khusus. Penulis juga berterima kasih kepada beberapa organisasi dan sumber data yang telah menyumbangkan materi terkait yang menjadi dasar kajian penelitian ini. Di era digital, dukungan dan kontribusi dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk menghasilkan penelitian yang memajukan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Alfarizi, "Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia," *J. Stud. Kebijak. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 41–54, 2023, doi: 10.21787/jskp.2.2023.41-54.
- [2] M. Alfi *et al.*, "Transformasi Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi Kasus Implementasi Aplikasi Jaki)," *J. Penelit. Ekon. Manaj. dan Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 140–149, 2023.
- [3] C. A. Gemawaty, "Peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi DKI Jakarta," *J. Serambi Ekon. dan Bisnis*, vol. 7, no. 1, pp. 237–243, 2024.
- [4] M. F. Farendy and R. N. Akbar, "Analisis Strategi Pemerintah Provinsi dalam Membangun Konsep Smart City: Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," *J. Ilm. Wahana Pendidik.*, vol. 10, no. 13, pp. 537–

- 548, 2024.
- [5] T. Kurnia and A. Djunaedi, "Tahapan Perkembangan Provinsi DKI Jakarta Menuju Smart City," *Tataloka*, vol. 22, no. 4, pp. 538–555, 2020, doi: 10.14710/tataloka.22.4.538-555.
- [6] Y. Firmansyah, "Penerapan Konsep Jakarta Smart City Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2017," *Public Adm. J.*, vol. 3, no. 2, pp. 125–144, 2019.
- [7] R. Jayanthi and A. Dinaseviani, "Kesenjangan Digital dan Solusi yang Diterapkan di Indonesia Selama Pandemi COVID-19," *J. IPTEKKOM J. Ilmu Pengetah. Teknol. Inf.*, vol. 24, no. 2, pp. 187–200, 2022, doi: 10.17933/iptekkom.24.2.2022.187-200.
- [8] D. Aditya Nugroho and A. Voutama, "Perancangan Aplikasi Berbasis Web Menggunakan Metode SDLC untuk Mengembangkan Sektor Pariwisata Desa Hanau Berak," *Inf. Manag. Educ. Prof.*, vol. 7, no. 2, pp. 154–163, 2023.
- [9] A. T. Rohman and G. S. Panglipury, "Implementasi Metode Sdlc Dalam Transformasi Desa Melalui Inovasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Android," *J. Inform. dan Tek. Elektro Terap.*, vol. 12, no. 1, 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i1.3769.
- [10] M. Rizky Febriansyah and A. Voutama, "Rancang Bangun Sistem Ujian Online Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.)*, vol. 8, no. 3, pp. 2640–2647, 2024, doi: 10.36040/jati.v8i3.9563.
- [11] F. A. Trinanda *et al.*, "PERANCANGAN WEBSITE SISTEM INFORMASI SI-PEGANG MENGGUNAKAN METODE WATERFALL PADA," vol. 13, no. 1, 2025.
- [12] R. F. Subiyanto, M. A. Guffari, A. A. Saputra, and N. Nurdin, "Mengkaji Dampak Implementasi Aplikasi JAKI Terhadap Aksesibilitas Pelayanan Publik di Kota Jakarta," *Indones. J. Soc. Dev.*, vol. 1, no. 4, p. 14, 2024.
- [13] N. Evita and A. A. Mukhaer, "Evaluasi komunikasi dan literasi digital warga Jakarta dalam implementasi society 5.0," *J. Ris. Komun.*, vol. 5, no. 2, pp. 172–186, 2022.
- [14] A. Yuniar *et al.*, "PENERAPAN APLIKASI JAKARTA KINI (JAKI) DALAM PERSPEKTIF SMART GOVERNANCE," *J. Hum. Revolutioner*, vol. 9, no. 1, 2025.
- [15] T. Permana and A. Puspitaningsih, "Studi Ekonomi Digital Di Indonesia," *J. Simki Econ.*, vol. 4, no. 2, pp. 161–170, 2021, doi: 10.29407/jse.v4i2.111.
- [16] M. A. Ramadhani and E. Handoyo, "Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City dalam Mewujudkan Smart Governance pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," *Unnes Polit. Sci. J.*, vol. 6, no. 2, pp. 42–47, 2022.
- [17] R. Rachmawati, E. T. W. Mei, I. W. Nurani, R. A. Ghiffari, A. A. Rohmah, and M. A. Sejati, "Innovation in coping with the covid-19 pandemic: The best practices from five smart cities in Indonesia," *Sustainability*, vol. 13, no. 21, p. 12072, 2021.
- [18] L. Lail, "Implementasi Kebijakan Smart City di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," 2017, *Universitas Brawijaya*.